

Policy Brief #4

Food Estate: Challenges and Strategic Recommendations for Achieving National Food Security

Pendahuluan

SUDRAJAT NUR FARIZI

Program Food Estate merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Walaupun program ini telah diperkenalkan sejak era Presiden Soeharto, evaluasi menunjukkan hasilnya belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pendekatan Food Estate kembali diangkat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

Pelaksanaan program ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya infrastruktur pendukung, ketidaksesuaian dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal, serta dampak negatif terhadap lingkungan, seperti terjadinya kebakaran hutan. Melalui kolaborasi lintas kementerian, upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan.

Meskipun ada upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan, proyek-proyek Food Estate sering menghadapi berbagai hambatan, seperti kegagalan panen, banjir, dan perubahan pola tanam masyarakat setempat. Tantangan dalam pengelolaan lahan, kurangnya infrastruktur pendukung,

serta regulasi yang belum memadai menjadi penyebab utama kegagalan program ini.

Para ahli pertanian menekankan pentingnya persiapan yang matang, mencakup desain program yang baik dan dukungan komprehensif, seperti penyediaan modal, sarana produksi, dan akses pemasaran.

Kesimpulannya, meskipun Food Estate menjadi salah satu program prioritas dalam strategi ketahanan pangan nasional, implementasinya belum sepenuhnya berhasil. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan tinjauan ulang kebijakan diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program ini di masa depan.

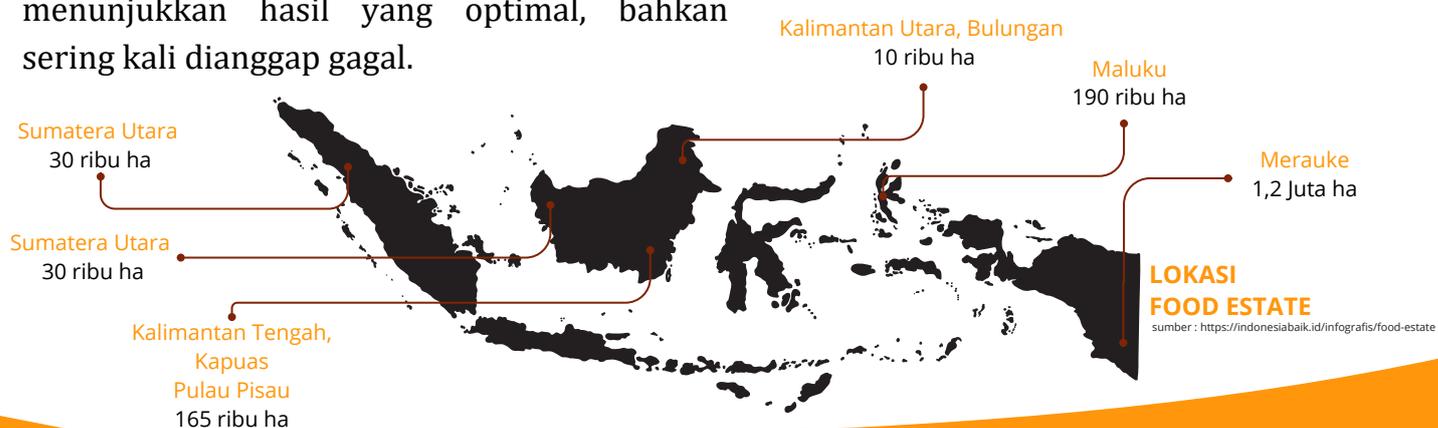
Challenges in Indonesia's Food Estate Program: Addressing Issues for Sustainable Food Security

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring pertumbuhan populasi di Indonesia. Dalam 11 tahun terakhir, Indonesia menghabiskan Rp1,272 triliun untuk mengimpor bahan pokok, dengan enam dari sembilan bahan pokok utama—seperti beras, susu, daging, gula, garam, dan bawang—masih bergantung pada impor. Ketergantungan ini berisiko mengancam kemandirian pangan nasional. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan ketahanan pangan melalui program Food Estate, yang bertujuan mengembangkan sektor pangan secara terintegrasi dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Program ini dikelola oleh beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Pertahanan, Pertanian, LHK, dan PUPR.

Cakupan dan jumlah wilayah yang dikembangkan sebagai lumbung pangan belum menunjukkan hasil yang optimal, bahkan sering kali dianggap gagal.

Masalah ini sudah menjadi perhatian publik di Indonesia, terutama karena program Food Estate belakangan ini menjadi topik perbincangan yang hangat. Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP, mengkritik program ini dengan menyebutnya sebagai sebuah kegagalan sekaligus bentuk kejahatan terhadap lingkungan. Dalam pelaksanaannya, program Food Estate belum sepenuhnya berhasil dan realisasinya masih jauh dari harapan.

Program Food Estate di bawah pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kegagalan dalam implementasinya, seperti proyek perkebunan singkong di Kalimantan Tengah yang terbengkalai dan sawah baru yang gagal panen. Selain itu, program ini memicu masalah baru, termasuk banjir dan perubahan tradisi bercocok tanam masyarakat Dayak.



Pemerintah mengakui adanya kekurangan, kegagalan di Kalimantan Tengah disebabkan oleh kurangnya anggaran dan regulasi. Program ini juga gagal di wilayah gambut, memperburuk kondisi ekosistem dan memicu kebakaran. Pakar pertanian Prof. Subejo menyebut program ini terburu-buru diluncurkan tanpa perencanaan yang matang, dan masih kurang dalam hal pengelolaan lahan, penyediaan modal, sarana produksi, dan pasar Pemerintah mengakui adanya kekurangan, dengan kegagalan di Kalimantan Tengah disebabkan oleh kurangnya anggaran dan regulasi.

Kegagalan food estate menimbulkan masalah, mulai dari segi lingkungan maupun sosial, seperti kerusakan lingkungan, banjir, dan perubahan pola tanam masyarakat, yang semuanya menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang. Keberhasilan program ini membutuhkan perhatian pada berbagai faktor pendukung, seperti ketersediaan lahan, sumber daya, aspek lingkungan, keterlibatan masyarakat, infrastruktur, dan kebijakan yang solid.

Food estate ini dimulai sejak era Presiden Soeharto, dilanjutkan pada masa Presiden SBY, dan kembali menjadi prioritas di era Presiden Jokowi, namun hingga kini masih menghadapi hambatan untuk mencapai keberhasilan.

Rekomendasi

Pertama, dari segi pengembangan infrastruktur, kekurangan infrastruktur pertanian menjadi hambatan utama, terutama dalam distribusi faktor produksi dan hasil pertanian dari lahan ke pasar. Peningkatan infrastruktur irigasi menjadi langkah penting untuk mendukung pengelolaan air yang lebih efisien. Alih-alih langsung memperluas lahan pertanian, fokus utama seharusnya diarahkan pada penguatan sistem pasokan pangan melalui intensifikasi. Selain itu, dukungan kepada petani, seperti pembebasan pajak lahan, peningkatan subsidi pupuk, dan kebijakan lain yang meringankan beban mereka, perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas.

Kedua, dalam hal pelestarian lingkungan, masalah lingkungan sangat penting untuk diatasi dalam isu food estate. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi konsep ekonomi sirkular dengan mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti agroforestri dan permaculture. Fokus pada teknik pertanian yang dapat memulihkan tanah, seperti penggunaan pupuk organik dan penggembalaan bergilir, dapat meningkatkan kesehatan dan hasil tanah.

Selain itu, strategi pengurangan limbah, seperti memanfaatkan limbah organik menjadi pupuk, harus diterapkan untuk mendukung ekonomi sirkular dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Meskipun sudah ada regulasi dari Kementerian LHK dalam Permen-LHK Nomor P.24/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020, aturan tersebut tampaknya masih kurang efektif dalam mengawasi pelaksanaan food estate. Ketidakpastian hukum ini bisa menyebabkan kebijakan pemerintah yang kurang jelas dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat.

Ketiga, dalam hal pengelolaan manajemen, Pengelolaan manajemen food estate menghadapi tantangan akibat pengelolaan yang belum matang, yang dapat mengancam kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Pemberdayaan petani lokal penting untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan peran mereka dalam rantai pertanian, melalui peningkatan akses sumber daya, pelatihan teknis, serta penyediaan modal dan teknologi modern. Partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat vital, bersama dengan kolaborasi antara petani, pemerintah, swasta, dan LSM untuk menciptakan sistem pertanian berkelanjutan. Pengendalian manajemen melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan efektivitas program dan perbaikan yang diperlukan.

Keempat, dalam pengelolaan lahan, penggunaan lahan menjadi fokus utama dalam program food estate untuk mengoptimalkan potensi lahan yang belum dimanfaatkan. Langkah awal melibatkan identifikasi dan pemetaan lahan yang sesuai untuk pertanian, memperhatikan karakteristik tanah dan iklim. Program ini juga mendorong diversifikasi tanaman guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko gagal panen, serta pengelolaan sumber daya alam seperti air dan tanah untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pemberdayaan petani lokal sangat penting, dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, pemilihan tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian. Tujuan program ini adalah menciptakan model agribisnis yang efisien, berkelanjutan, dan berdampak positif pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.



foto Food Estate

<https://benua.id/potret-food-estate-kalteng-ditanam-padi-justru-tumbuh-sawit/>

Penutup

Program Food Estate memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional, namun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang kurang memadai, kegagalan panen, dan dampak lingkungan negatif. Meskipun sudah ada sejak era Presiden Soeharto dan dilanjutkan pada masa Presiden Jokowi, implementasinya belum optimal. Perencanaan yang belum matang, pengelolaan lahan yang kurang efektif, serta kurangnya pemberdayaan petani lokal menjadi kendala utama. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan perbaikan kebijakan sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan lebih baik. Dengan perbaikan di berbagai aspek, Food Estate bisa menjadi model pertanian berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat.

Daftar Bacaan

1. Ayu Mutia, A. N., Nurlinda, I., & Astriani, N. (2022). Pengaturan Pembangunan Food Estate Pada Kawasan Hutan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 224–240. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.259>
2. Ishotono, & Raharjo, S. T. (2016). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Share : Social Work Journal*, 6(2), 159. <https://doi.org/10.24198/SHARE.V6I2.13198>
3. Muhammad. (2023, July 5). Indonesia Negara Darurat Impor Pangan! *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230704185303-128-451320/indonesia-negara-darurat-impor-pangan>
4. Lasminingrat, L., & Efriza, D. (2020). Pembangunan Lumbung Pangan Nasional: Strategi Antisipasi Krisis Pangan Indonesia the Development of National Food Estate : the Indonesian Food Crisis Anticipation Strategy. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 244–260.
5. Gloriabarus. (2023, Agustus 24). Pakar UGM Paparkan Alasan Kebijakan Lumbung Pangan Dinilai Gagal. Retrieved from ugm.ac.id: <https://ugm.ac.id/id/berita/pakar-ugm-paparkan-alasan-kebijakan-lumbung-pangan-dinilai-gagal/> Greenpeace. (2023)